

Jupe UNS, Vol 1, No. 3 Hal 1 s/d 11 – Rafika Lihani_ *Analisis Manajemen Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)* |Juli, 2013

ANALISIS MANAJEMEN KREDIT GUNA MEMINIMALKAN RISIKO KREDIT (Studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar)

Rafika Lihani, Ngadiman, Nurhasan Hamidi

***Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta**

E-mail: rafikalihani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis: 1) penerapan manajemen kredit, 2) upaya penyelamatan kredit bermasalah, 3) upaya penyelesaian kredit macet pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan adalah strategi tunggal terpancang yaitu memfokuskan pada satu masalah. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik bola salju (*snowball sampling*) dengan menetapkan informan kunci (*key informans*). Sumber datanya adalah informan, tempat dan peristiwa serta dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Untuk validitas data, menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Simpulan penelitian ini adalah: 1) Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu belum terimplementasi secara maksimal. Kurang maksimalnya penerapan manajemen kredit antara lain dalam hal: analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian pihak pemutus kredit dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. 2) upaya penyelamatan kredit bermasalah disesuaikan pada kondisi kredit yang bermasalah, penyebab dari terjadinya kredit bermasalah tersebut dan itikad baik dari nasabah 3) Penyelesaian kredit macet yang dilakukan berhubungan dengan pencairan jaminan untuk pelunasan kredit, penghapusbukuan dan upaya hukum.

Kata Kunci: manajemen kredit, penanganan kredit bermasalah, risiko kredit

ABSTRACT

The aim of this research is to study and analyze: 1) management credit implementation, 2) a saving effort on non performing loans, 3) a solving effort of bad credit on PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar.

This research is used descriptive qualitative approach. Strategi used is single rooted strategy that focuses on one problem. Sampling technique used is snowball sampling with deciding key informants. the data sources used are interview, observation, and document analysis. For data validity, it is used source and method triangulation. While data analyzing technique used is interactive analysis.

The conclusion of this research is: 1) management credit decided by PD BPR BKK Tasikmadu not implemented maximum. Management credit not maximum it is in case: credit analysis done is not maximum, it is less hold carefulness principle by decision maker and from monitoring was implemented is less effective. 2) an effort of in solving non performing loan adapted on credit condition, cause factor of non performing loan happen, and good will from the customer. 3) Problem solving on bad credit done are related with mortgage liquidation to pay off the credit, clean of account and law effort.

Key words: credit management, bad credit solving, credit risk.

PENDAHULUAN

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank memberikan jasa kredit kepada debitur untuk memperoleh pendapatan dari bunga kredit tersebut dan debitur melakukan pinjaman/kredit untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan dana, sehingga dengan kredit kedua belah pihak akan saling memperoleh keuntungan.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan, dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksudnya, si pemberi kredit percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktunya (Kasmir, 2002). Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:113), "kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman non tunai (*non-cash loan*)". Dengan melaksanakan penyaluran kredit dapat dikatakan bank

menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Saat ini, masyarakat baik individu maupun kelompok banyak yang meminjam dana ke bank untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun modal usaha. Hal itu sangat menguntungkan bagi pihak bank karena pemberian kredit merupakan sumber utama penghasilan bank.

Dalam melaksanakan bisnis di bidang industri perbankan, setiap bankir harus benar-benar menyadari berbagai risiko bisnis yang dihadapinya. Usaha perbankan adalah usaha yang memiliki risiko yang tinggi baik dari aspek penarikan dana maupun dari aspek penyaluran dana. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit.

Dalam menghadapi risiko kredit, kredit yang diberikan kepada nasabah mengalami kesulitan pelunasan sehingga ada kemungkinan bank mengalami kerugian. Oleh karena itu, para bankir harus melakukan perencanaan yang tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat. Manajemen bank harus melakukan analisis dengan teliti terhadap masing-masing kredit ini untuk meminimalkan risikonya serta perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang disusun

untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat-pejabat kredit untuk memutuskan permohonan kredit. Kebijakan perkreditan yang disusun tersebut digunakan untuk membantu manajemen bank dalam menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit dan memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan bahwa “kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Risiko kredit harus diantisipasi oleh bank melalui suatu proses penilaian serta analisis kredit yang benar dan tepat. Proses analisis kredit tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai prospek calon debitur dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam membayar kembali kredit yang diterimanya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam proses analisis pemberian kredit, selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur. Berbagai sumber informasi kredit mengenai calon debitur itu dapat diperoleh pihak bank antara lain melalui data pribadi calon debitur, wawancara, catatan bank atau arsip bank mengenai riwayat pinjaman, dan data lain yang dapat dipakai sebagai sumber informasi.

Setelah permohonan kredit calon debitur disetujui dan kredit dicairkan, maka tugas bank selanjutnya adalah melakukan pengawasan agar kredit dipergunakan sesuai dengan permohonan, bunga dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta pengembalian pinjaman dilakukan tepat waktu. Pengawasan yang dilakukan pihak bank terhadap kelancaran pembayaran kredit harus dilaksanakan sampai kredit tersebut lunas, hal tersebut dilakukan untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah. Salah satu kendala dalam kredit adalah apabila pihak bank kesulitan menagih kredit yang telah diberikan kepada debitur, walaupun analisis pemberian kredit telah dilaksanakan tetapi permasalahan-permasalahan dalam perkreditan tidak dapat dihindari sehingga terkadang terdapat kredit yang bermasalah

dalam dunia perbankan. Kredit bermasalah dan kredit macet memberikan dampak yang ganda terhadap investasi dana karena dana yang dikreditkan kepada debitur terlambat kembali atau tidak kembali kepada kreditur sehingga dana yang telah dikreditkan tersebut tidak dapat dikreditkan kembali kepada debitur lain yang membutuhkan. Menurut Reed dan Gill (1995:301) “pinjaman bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Kerugian dapat mengurangi cadangan atau modal yang menguras kekuatan keuangan bank dan mengurangi kemampuan bank untuk melayani nasabahnya dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi”.

Manajemen bank dalam memberikan kredit harus didasarkan atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang maksimal. Jika pengalokasian kredit dilakukan berdasarkan fungsi manajemen yang baik maka kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat dihindari. Mengenai upaya untuk meminimalisir risiko kerugian bank, Suhardjono (2003:81) berpendapat “Bank wajib melaksanakan transaksi tersebut dengan berpedoman pada kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-

hatian”. Oleh karena itu agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten maka manajemen BPR harus memiliki pedoman yang digunakan untuk menetapkan kebijakan perkreditan, hal tersebut diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Dalam dunia perbankan sering terjadi kredit macet, seandainya apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya kredit macet tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank “bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (*non performing loan/financing*)

secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa dengan menerapkan manajemen kredit serta analisis kredit minimal menggunakan prinsip 5C dengan sebaik mungkin, diharapkan pihak bank dapat menekan tingkat kredit bermasalah. Menurut Reed dan Gill (1995:184), “tujuan dari analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman”. Dalam hal kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, walaupun sebagian pinjaman bermasalah dianggap serius tapi pinjaman tersebut dapat dilakukan upaya penyelamatan, sehingga diharapkan sebagian pinjaman bermasalah tersebut dapat berkembang ke arah perbaikan. Semakin cepat mengidentifikasi gejala timbulnya kredit bermasalah semakin baik bagi bank, karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian bagi pihak bank.

Imbauan Bupati Karanganyar Mengenai Indeks NPL PD BPR BKK Tasikmadu. JOGLOSEMAR (2010), Bupati Karanganyar Rina Iriani meminta kepada

seluruh Perusahaan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) yang ada di Kabupaten Karanganyar menurunkan non performing loan (NPL) atau kredit macet hingga satu persen atau maksimal 5% sedangkan Direktur utama BPR BKK Tasikmadu Sugimin menjelaskan di akhir tahun 2010 indeks NPL sebesar 8,59 persen. Imbauan Bupati Karanganyar Mengenai Kredit Macet PD BPR BKK Tasikmadu. JOGLOSEMAR (2011), Direktur Utama PD BPR BKK Tasikmadu, Sugimin mengungkapkan BPR BKK Tasikmadu mempunyai pekerjaan rumah untuk membereskan kredit macet yang mencapai Rp 3,28 miliar yang berasal dari 922 debitur. Bupati Karanganyar, Rina Iriani mengharapkan kredit macet yang ada bisa segera diatasi, sebab kredit macet inilah yang turut mempengaruhi kesehatan bank, untuk mengatasi kredit macet ini BPR BKK diminta untuk lebih selektif dalam memberikan kredit pada nasabah, namun bukan berarti menghambat pengguliran modal untuk masyarakat.

Untuk meminimalkan risiko kerugian dari pemberian kredit, maka bank dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu berpedoman pada kebijakan dan prosedur manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian

dalam menganalisis kredit sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Apabila kegiatan analisis kredit dilakukan secara baik dan benar, maka dikemudian hari akan terhindar dari risiko kredit macet atau kredit bermasalah. Selain penerapan proses analisis yang baik, upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang tepat sangat diperlukan guna menghindari terjadinya kerugian pihak bank.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah. 3) Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dalam upaya penyelesaian kredit macet.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar karena terdapat masalah mengenai jumlah *Non Performing Loan* yang belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi tunggal terpancang. Sumber data terdiri dari nara sumber, peristiwa atau aktivitas, tempat dan lokasi, benda, beragam gambar atau rekaman, dokumen dan arsip.

Adapun dalam teknik pengambilan sampel berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan arsip.

Trianggulasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi data dan trianggulasi metode. Model analisis yang digunakan adalah model analisis mengalir atau saling terjalin. Untuk lebih jelasnya dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar

Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU

Tanggal 19 September 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu belum maksimal karena masih terdapat kekurangan dalam hal: analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian pihak pemutus kredit dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. Adapun pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada PD BPR BKK Tasikmadu adalah sebagai berikut:

Perencanaan kredit

Perencanaan kredit yang diterapkan telah menunjukkan perumusan tujuan yang jelas, menetapkan sasaran, dan menyusun strategi-strategi yang digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan yaitu dilunasinya pinjaman debitur dan meminimalisir kredit bermasalah.

Pengorganisasian

Pengorganisasian yang diterapkan oleh PD BPR BKK Tasikmadu sudah tepat seperti yang tercantum pada struktur organisasi dan *job description*.

Pelaksanaan pemberian kredit

Pelaksanaan pemberian kredit yang diterapkan oleh PD BPR BKK Tasikmadu adalah prosedur pemberian kredit yang mudah, jaminan kredit, syarat-syarat yang harus dipenuhi cukup efektif untuk menghindari kredit bermasalah. Namun analisis kredit yang

harus dilakukan kurang efektif karena belum semua prinsip 5C dan 7P diterapkan, terutama prinsip *character* dan *personality*. Kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian dalam memutuskan kredit terutama untuk kredit dengan plafond kecil atau kurang dari 5 juta dan masih ditemukan adanya unsur subyektifitas dalam memutuskan kredit.

Pengawasan

Pengawasan yang diterapkan belum efektif untuk menurunkan risiko kredit karena dilakukan dengan maksimal setelah terjadi kredit bermasalah.

Kebijakan PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah

Upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD BPR BKK Tasikmadu disesuaikan pada i'tikad baik dari nasabah, kondisi kredit dan penyebab dari terjadinya kredit bermasalah tersebut. I'tikad baik dari nasabah diperlukan untuk menilai komitmen dan sejauh mana keinginan nasabah untuk melunasi kredit bermasalah tersebut. Kondisi kredit juga diperlukan untuk menetapkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kolektibilitas kredit nasabah tersebut agar lebih efektif. Selain i'tikad dan kondisi kredit, petugas perlu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah untuk

memudahkan dalam menetapkan upaya penyelamatan yang tepat. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang paling banyak terjadi pada PD BPR BKK Tasikmadu disebabkan dari pihak debitur yang mengalami kemacetan usaha dan karakter yang buruk, sedangkan faktor dari bank disebabkan karena kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dan pengawasan yang kurang efektif. Upaya penyelamatan kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu yaitu: 1) pemberitahuan keterlambatan pembayaran, 2) penagihan intensif, 3) memberikan surat peringatan, 4) mendatangi debitur bersama tim dan melakukan negosiasi.

Kebijakan PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar dalam upaya penyelesaian kredit macet

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD BPR BKK Tasikmadu dilakukan dengan cara: 1) Pembelian barang jaminan oleh bank yang pembayarannya diperhitungkan dengan utang debitur tersebut. 2) Penjualan barang jaminan untuk melunasi utang kepada bank, baik dilakukan oleh debitur itu sendiri dengan persetujuan dan pengawasan bank. 3) Penebusan jaminan atau penarikan jaminan dari bank oleh debitur dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. 4) Penghapusbukuan

kredit. 5) Penyelesaian melalui jalur hukum oleh pihak ketiga.

Beberapa kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit antara lain buruknya karakter nasabah, jaminan tidak likuid atau *marketable*, debitur meninggal dunia atau terdapat masalah keluarga misalnya perceraian, dan apabila ternyata kredit yang diberikan kepada debitur tidaklah dipergunakan oleh pihak ketiga. Namun meskipun menjumpai beberapa kendala, dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit yang dilakukan terbukti mampu menurunkan besarnya persentase NPL dan jumlah kredit macet, dengan kata lain bank mampu meminimalisir risiko kredit atau kerugian yang mungkin ditanggung oleh pihak bank.

Dilihat dari data kolektibilitas kredit PD BPR BKK Tasikmadu persentase NPL dan jumlah kredit macet mengalami penurunan, pada tahun 2010 NPL PD BPR BKK Tasikmadu Pusat sebesar 8,59% dan pada akhir tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 7,65%. Sedangkan NPL KPO 1 dari data pada bulan Juli 2012 sebesar 9,51% dengan kredit macet sebesar Rp 469.529.446, Desember 2012 sebesar 7,15% dengan kredit macet sebesar Rp 361.155.687, dan Maret 2013 sebesar 6,51% dengan kredit macet

sebesar Rp 355.315.389. Namun besarnya NPL PD BPR BKK Tasikmadu belum sesuai dengan imbauan dari Bupati Karanganyar agar NPL tidak lebih dari 5%. Namun dapat dilihat bahwa jumlah NPL dan kredit macet mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah bisa dikatakan cukup berhasil.

Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu masih belum maksimal karena masih terdapat kekurangan dalam hal: analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian pihak pemutus kredit dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. Simpulan tersebut mendukung teori mengenai manajemen kredit menurut Kasmir (2004, 71-72) yang mengungkapkan bahwa agar bank mampu menyalurkan kredit dan terhindar dari kerugian diperlukan pengelolaan kredit yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.

Kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PD BPR BKK Tasikmadu yang dilaksanakan mampu untuk meminimalisir kerugian bank, upaya

tersebut dapat mendorong kredit bermasalah ke arah perbaikan dan mengurangi jumlah kredit macet. Simpulan tersebut mendukung pendapat Rivai, Veithzal (2006:482) bahwa penyelamatan kredit merupakan upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau kualitas kredit nasabah meningkat.

Penyelesaian kredit yang diterapkan mendukung pendapat Rivai, Veithzal (2006:482) bahwa upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha pembinaan, penyelamatan dan dengan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari nasabah dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank.

SIMPULAN

Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu masih belum maksimal karena masih terdapat kekurangan dalam hal: analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang dipegangnya prinsip

kehati-hatian pihak pemutus kredit dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. Kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PD BPR BKK Tasikmadu yang dilaksanakan mampu untuk meminimalisir kerugian bank, upaya tersebut dapat mendorong kredit bermasalah ke arah perbaikan dan mengurangi jumlah kredit macet.

SARAN

Berdasarkan simpulan dan implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen kredit PD BPR BKK Tasikmadu. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

Prosedur analisis kredit hendaknya dilaksanakan dengan lebih maksimal dan unsur prinsip 5C dan 7P dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, terutama prinsip *character* dan *personality*. Bagi pihak pemutus kredit hendaknya lebih berhati-hati sebelum memutuskan kredit dengan meneliti ulang hasil analisis kredit terutama untuk kredit dengan plafond kecil atau kurang dari 5 juta dan meneliti adakah hubungan antara nasabah dan calon debitur agar unsur subyektifitas dapat terhindarkan. Pengawasan kepada nasabah hendaknya dilakukan sebelum

terjadi kredit bermasalah secara rutin pada setiap pelaksanaan pemberian kredit. Selain pengawasan kepada nasabah sebaiknya juga perlu untuk lebih ditingkatkan pengawasan terhadap karyawan yang terlibat dalam melaksanakan tugas pemberian kredit, instrumen pendukung dan pengelolaan kredit supaya tidak terjadi penyimpangan atas kredit yang disalurkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada: Keluarga besar Program Studi Pendidikan Ekonomi khususnya Bidang Keahlian Khusus Akuntansi. Pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini. Pimpinan dan seluruh pegawai PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar. Prodi Pendidikan Ekonomi khususnya BKK Pendidikan Akuntansi. Segenap TIM redaksi Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) FKIP UNS. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

_____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Diperoleh 03 September 2012, dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75->

9858774DF852/13313/uu_bi_1099.pdf

_____, *Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Diperoleh 3 Maret 2013, dari http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/05C201E7-BDB4-4D07-97A6-28FE383F1FD4/27149/lamp_se_142613.pdf

JOGLOSEMAR. (2010, 30 September). PD BPR BKK dihadapkan kredit macet Rp 32 miliar. Diperoleh 25 Maret 2013, dari <http://www.edisicetak.joglosemar.co/>

Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Purnomo, Ari (2011, 1 Februari). Bupati minta kredit macet di bawah 5%. *JOGLOSEMAR*. Diperoleh 13 April 2013, dari <http://www.edisicetak.joglosemar.co/>

Reed, E.W. & Edward K.G. (1995). *Bank Umum*. Jakarta:Bumi Aksara.

Rivai&Veithzal, (2006). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Suhardjono.(2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogya: UPP AMP YKPN.

Triandaru, S & Totok B.S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta:Salemba Empat.